

PEMANFAATAN PODCAST OLEH KPU KOTA BENGKULU DALAM MENGINFORMASIKAN ISU KEPEMILUAN DI MEDIA SOSIAL

Adibio Ramadinov¹, Nora Apriani², Amelia Febrianty³, Nabila Afifah⁴, Ilham Kurniawan
Ardi⁵

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

Email: adibo3893@gmail.com, noraapriani02@gmail.com, afebrianty4@gmail.com,
nabila.dno@gmail.com, ilhamkuardi@unib.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the utilization of podcasts by the Bengkulu City General Elections Commission (KPU Kota Bengkulu) as a medium for disseminating electoral issues through social media platforms. In response to the challenges of increasing information flow and low voter engagement with formal content, podcasts were chosen as an alternative communication approach considered more relaxed, engaging, and accessible. This research employs a qualitative descriptive method through interviews, podcast content observations, and analysis of KPU Bengkulu City's social media activities. The findings indicate that podcasts help expand information outreach, strengthen electoral education, and create a more humanized interaction between election organizers and the public. However, their effectiveness is still influenced by content production consistency, presentation quality, and distribution strategies on social media. This study concludes that podcasts can serve as a relevant public communication innovation for election management bodies to enhance public literacy and participation.

Keywords: *podcast, KPU Bengkulu City, electoral issues, social media, public communication.*

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan podcast oleh KPU Kota Bengkulu sebagai media penyampaian informasi terkait isu pemilihan melalui platform media sosial. Di tengah tantangan derasnya arus informasi dan rendahnya minat pemilih terhadap konten formal, podcast dipilih sebagai bentuk komunikasi alternatif yang lebih santai, menarik, dan mudah diakses. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi konten podcast, serta analisis aktivitas media sosial KPU Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa podcast efektif dalam memperluas jangkauan informasi, meningkatkan edukasi pemilihan, dan menciptakan interaksi yang lebih humanis antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Kendati demikian, efektivitas pemanfaatannya masih dipengaruhi oleh konsistensi produksi konten, kualitas penyajian, dan strategi distribusi di media sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa podcast dapat menjadi inovasi komunikasi publik yang relevan bagi lembaga penyelenggara pemilu untuk meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: podcast, KPU Kota Bengkulu, isu pemilihan, media sosial, komunikasi publik.

PENDAHULUAN

Indonesia mencatatkan rekor sebagai negara dengan pendengar podcast terbanyak di dunia pada Februari 2025, dengan 42,6 persen pengguna internet berusia 16 tahun ke atas rutin mendengarkan podcast setiap minggunya, jauh melampaui rata-rata global yang hanya 22,1

persen.¹ Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari transformasi lanskap komunikasi publik lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang mengalami pergeseran paradigmatik seiring dengan akselerasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang diamanatkan untuk menyelenggarakan pemilihan umum berdasarkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,² kini dihadapkan pada urgensi untuk beradaptasi dengan dinamika media digital dalam menjalankan fungsi edukasi dan sosialisasi kepada pemilih. Dalam konteks hukum positif Indonesia, tugas sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan bagian integral dari kewenangan KPU yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 53 ayat (1) huruf e yang menegaskan bahwa PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan struktur KPU di berbagai tingkatan berkewajiban "Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepada masyarakat."³

Kewajiban ini kemudian dioperasionalisasikan melalui Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.⁴ Dengan rata-rata durasi mendengarkan podcast mencapai 1 jam 4 menit per hari,⁵ Indonesia menempati peringkat kesembilan dunia, menunjukkan potensi besar podcast sebagai medium komunikasi publik yang perlu dioptimalkan oleh lembaga pemerintah, termasuk KPU.

Era digitalisasi telah mengubah pola konsumsi informasi masyarakat, terutama di kalangan pemilih muda yang mendominasi komposisi demografis pemilih Indonesia. Pada awal 2025, Indonesia memiliki 143 juta pengguna media sosial aktif, dengan masyarakat menghabiskan rata-rata 3 jam 8 menit per hari untuk berselancar di media sosial.⁶ Penelitian menunjukkan bahwa pada Pemilu 2024, pemilih berusia 17-39 tahun mencapai 55 hingga 60 persen dari total pemilih,⁷ suatu fakta yang menuntut KPU untuk mengembangkan strategi komunikasi yang relevan dengan karakteristik generasi digital. Pergeseran ini mendorong KPU

¹ Databoks, "Indonesia, Negara dengan Pendengar Podcast Terbanyak Awal 2025," diakses 17 November 2025, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/67bd8f7c19196/indonesia-negara-dengan-pendengar-podcast-terbanyak-awal-2025>; We Are Social, *Indonesia Digital Report 2025* (Singapore: We Are Social, 2025).

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 22E.

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Pasal 53 ayat (1) huruf e.

⁴ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193

⁵ We Are Social, *Indonesia Digital Report 2025*

⁶ *Ibid.*

⁷ Gun Gun Heryanto dan Shanty Rumar, *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 142-145.

untuk bertransformasi dari pendekatan komunikasi konvensional berbasis media massa tradisional menuju pemanfaatan platform digital yang lebih interaktif dan personal. Podcast, sebagai medium audio on-demand yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, muncul sebagai salah satu pilihan strategis dalam menjawab tantangan tersebut.⁸ Fenomena podcast sebagai media komunikasi politik telah menunjukkan efektivitasnya di berbagai negara, termasuk dalam konteks kampanye politik dan edukasi kepemiluan.⁹ Di Indonesia sendiri, podcast telah menjadi konten yang digemari oleh 32 persen Gen Z, dengan topik hiburan, motivasi, dan inspirasi menjadi genre favorit.¹⁰

KPU Kota Bengkulu merepresentasikan salah satu inovasi dalam pemanfaatan podcast sebagai instrumen sosialisasi isu kepemiluan di tingkat daerah. Inisiatif ini menarik untuk dikaji mengingat masih terbatasnya penelitian empiris mengenai penggunaan podcast oleh lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia, khususnya pada level kota/kabupaten. Berbeda dengan KPU tingkat pusat yang telah lebih dulu mengadopsi podcast dalam strategi komunikasinya,¹¹ implementasi di tingkat kota/kabupaten memiliki kompleksitas tersendiri yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, kapasitas teknis, dan karakteristik audiens lokal. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada strategi komunikasi KPU melalui media konvensional dan media sosial mainstream,¹² sementara kajian spesifik mengenai podcast sebagai medium sosialisasi kepemiluan di tingkat daerah masih minim. Kondisi ini menciptakan kesenjangan pengetahuan (research gap) yang perlu diisi melalui penelitian empiris yang mendalam.

Lebih jauh, fenomena pemanfaatan podcast oleh KPU Kota Bengkulu menjadi signifikan ketika dikontekstualisasikan dengan kondisi literasi politik masyarakat Bengkulu yang masih terbatas dan cenderung berorientasi prosedural kepemiluan, belum mencapai tahap pemahaman substantif mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi.¹³ Dalam kerangka hukum administrasi negara, upaya sosialisasi dan edukasi pemilih bukan sekadar kewajiban formal, melainkan merupakan instrumen untuk mewujudkan pemilu yang

⁸ Efi Fadilah, Pandan Yudhapramesti, dan Nindi Aristi, "Podcast sebagai Alternatif Distribusi Konten Audio," *Jurnal Kajian Jurnalisme* 1, no. 1 (2017): 92, <https://doi.org/10.24198/kj.v1i1.10562>

⁹ Richard Berry, "Podcasting: Considering The Evolution of The Medium and Its Association with The Word 'Radio'," *The Radio Journal International Studies in Broadcast and Audio Media* 14, no. 1 (2016): 15-18.

¹⁰ GoodStats, "Fenomena Podcast, Dianggap Konten Segar dan Mulai Dinikmati Gen Z Indonesia," diakses 17 November 2025, <https://goodstats.id/article/fenomena-podcast-dianggap-konten-segar-dan-mulai-dinikmati-gen-z-indonesia-jGcdr>; IDN Research Institute, *Indonesia Millennial & Gen Z Report 2025* (Jakarta: IDN Media, 2025).

¹¹ Redi Panuju, "Podcast Politik Indonesia: Upaya Mencari Calon Presiden Indonesia 2024," *Jurnal Komunikasi Nusantara* 5, no. 1 (2023): 56, <https://doi.org/10.33366/jkn.v%vi%i.222>

¹² Chairunnisa Fanaqi, "Strategi Komunikasi KPU Kabupaten Garut Dalam Sosialisasi Pemilu 2014 Kepada Kelompok Disabilitas Di Kabupaten Garut," *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian* 4, no. 1 (2018): 26-30.

¹³ Muhammad Akmal Zakiruddin dan Baharuddin Iqbal Lestari, "Era Post Truth dan Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula," *AL-IMARAH: Jurnal*

demokratis, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.¹⁴ Podcast, dengan karakteristiknya yang fleksibel, interaktif, dan mampu menjangkau audiens muda, berpotensi menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kualitas literasi politik dan partisipasi pemilih.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua permasalahan pokok. Pertama, bagaimana proses produksi dan distribusi podcast kepemiluan yang dilakukan oleh KPU Kota Bengkulu sebagai strategi komunikasi publik dalam konteks penyelenggaraan pemilu? Kedua, apa saja kendala dan manfaat yang dirasakan oleh KPU Kota Bengkulu dalam implementasi podcast sebagai medium sosialisasi isu kepemiluan? Kedua pertanyaan ini penting untuk dijawab guna memahami tidak hanya aspek teknis dan operasional, tetapi juga efektivitas serta keberlanjutan penggunaan podcast sebagai instrumen komunikasi politik lembaga publik.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan secara komprehensif proses produksi dan distribusi podcast kepemiluan oleh KPU Kota Bengkulu, serta mengidentifikasi dan menganalisis kendala maupun manfaat yang muncul dalam praktiknya. Penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis yang tinggi. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian komunikasi politik, khususnya terkait dengan pemanfaatan media baru (new media) dalam komunikasi pemerintahan dan edukasi publik. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi KPU di berbagai tingkatan untuk mengoptimalkan strategi komunikasi digital dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif dan partisipatif. Dalam perspektif hukum tata negara dan administrasi negara, penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai implementasi kewajiban hukum lembaga penyelenggara pemilu dalam melaksanakan fungsi sosialisasi dan pendidikan pemilih di era digital.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara mendalam pemanfaatan podcast oleh KPU Kota Bengkulu dalam menyampaikan informasi kepemiluan melalui media sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota KPU, tim humas, pengelola media sosial, serta beberapa pendengar sebagai informan pendukung, disertai observasi terhadap proses produksi dan publikasi podcast, serta dokumentasi berupa konten podcast, postingan media sosial, dan data

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Pasal 2.

statistik keterlibatan audiens. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, serta member check untuk memastikan akurasi temuan. Metode ini memungkinkan peneliti memahami strategi komunikasi, efektivitas, dan tantangan KPU dalam memanfaatkan podcast sebagai inovasi sosialisasi kepemiluan.

PEMBAHASAN

A. PROSES KPU KOTA BENGKULU DALAM MEMBUAT DAN MENYEBARKAN PODCAST TERKAIT ISU KEPEMILUAN DI MEDIA SOSIAL

Hak KPU Kota Bengkulu, sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di tingkat kota, termasuk edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang isu-isu kepemiluan seperti tata cara pemungutan suara, hak dan kewajiban pemilih, serta pencegahan pelanggaran pemilu. Penggunaan podcast sebagai media informasi di era digital ini menjadi strategi efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda yang aktif di media informasi, karena format audio memungkinkan konsumsi secara fleksibel tanpa memerlukan waktu layar penuh.¹⁵ Namun, proses pembuatan dan penyebaran podcast ini melibatkan serangkaian langkah sistematis yang harus mematuhi regulasi pemerintah, etika komunikasi, dan standar teknis untuk memastikan akurasi, relevansi, dan berdampak pada edukasi yang maksimal.

Proses awal dalam pembuatan podcast dimulai dari tahap perencanaan, di mana tim komunikasi dan humas KPU Kota Bengkulu menyusun konsep dan konten yang akan disampaikan. Materi yang dipilih biasanya berkisar pada tahapan pemilihan, pentingnya partisipasi masyarakat, serta cara pengguna media sosial dalam memahami dan menyebarkan informasi pemilu yang benar.¹⁶ Setelah konsep disetujui, tim produksi melakukan riset mendalam untuk memastikan akurasi konten serta memastikan bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.¹⁷

Narasumber yang dihadirkan dalam setiap episode podcast KPU Kota Bengkulu berasal dari beragam latar belakang dan profesi strategi masyarakat di bidang kepemiluan, pemerintahan, komunikasi, serta sipil. Kerap kali, anggota internal KPU Kota Bengkulu sendiri, seperti Risen Lubis, S.Pd yang merupakan Anggota KPU Kota Bengkulu, diundang sebagai

¹⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). Panduan Penggunaan Media Sosial untuk Instansi Pemerintah . Jakarta: Kementerian Kominfo.

¹⁶ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu. (2023). Pedoman Penyusunan Konten Media Sosial Dalam Program Edukasi Pemilu. Bengkulu: KPU Kota Bengkulu.

¹⁷ Supriyono, A. (2022). Strategi Komunikasi Digital KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih. Jurnal Komunikasi dan Media, 8(2), 145-160

narasumber utama dengan pembahasan terkait teknis penyelenggaraan pemilu, regulasi terbaru, serta strategi peningkatan partisipasi pemilih. Hal ini penting untuk

memastikan masyarakat menerima informasi yang aktual dan sahih langsung dari penyelenggara pemilu.¹⁸

Selain itu, podcast ini juga rutin menghadirkan narasumber eksternal, seperti pejabat dari Pemerintah Kota Bengkulu, akademisi, tokoh masyarakat, dan praktisi komunikasi masyarakat. Contohnya, Ibu Rosdiana, SE., MM selaku Kabid Politik KESBANGPOL Kota Bengkulu pernah menjadi narasumber yang membahas pentingnya keahlian dalam memilih serta peran masyarakat menjaga keutuhan demokrasi. Bahasan dalam sesi tersebut menitikberatkan pada upaya mendorong pemilih cerdas dan dewasa secara politik demi memperkuat stabilitas bangsa.¹⁹

Tak hanya pejabat pemerintahan, podcast KPU Kota Bengkulu juga mengangkat tema terkait tantangan era digital, seperti penanganan disinformasi atau hoaks menjelang pemilu. Untuk topik ini, mereka menghadirkan narasumber dari kalangan praktisi humas, misalnya Hendri Akbar, SE (Pranata Humas Ahli Muda Kominfo Kota Bengkulu) yang membahas strategi literasi digital, pentingnya penyebaran informasi valid, dan masyarakat peran dalam mencegah polarisasi akibat informasi yang tersebar.²⁰

Sesi tertentu juga membahas isu-isu spesifik, seperti peran generasi muda dalam pengawasan demokrasi, hak pilih ASN, dinamika politik di media sosial, dan strategi menjaga perdamaian di tahun politik. Untuk menyajikan berbagai perspektif, terkadang episode menampilkan narasumber dosen universitas, pegiat demokrasi lokal, bahkan perwakilan dari lembaga penyiaran atau media daerah seperti Fonika Thoyib, S.Sos., MIKom (Ketua Komisi Penyuaran Indonesia Daerah).²¹

Adapun pokok bahasan dalam setiap episode podcast meliputi:

- a. Tahapan-tahapan pemilu dan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan.
- b. Pentingnya partisipasi aktif untuk demokrasi yang sehat.
- c. Strategi komunikasi digital dan sosialisasi anti hoaks.
- d. Pendidikan hukum dan etika pemilu serta perlindungan hak pilih.

¹⁸ KPU Kota Bengkulu. (2025). #TemanPemilih, Podcast KPU Kota Bengkulu kembali hadir dengan narasumber Risen Lubis, S.Pd—Anggota KPU Kota Bengkulu. Diakses dari Instagram <https://www.instagram.com/reel/DN4qpYSiYUs/>

¹⁹ KPU Kota Bengkulu. (2025). #TemanPemilih, Podcast bersama Ibu Rosdiana, Kabid Politik Kesbangpol Kota Bengkulu. Diakses dari Instagram. Diakses dari Instagram <https://www.instagram.com/reel/DPLOYc1iCtc/>

²⁰ KPU Kota Bengkulu. (2025). #Temanpemilih—Era Digital, Tantangan Baru untuk Demokrasi!, narasumber Hendri Akbar—Pranata Humas Ahli Muda Kominfo Kota Bengkulu. Diakses dari Instagram. Diakses dari Instagram https://www.instagram.com/reel/DQ3HT5_iDuo/

²¹ KPU Kota Bengkulu. (2025). #TemanPemilih, Podcast bersama Fonika Thoyib (Ketua KPID), Dosen, dan Praktisi. Diakses dari Instagram <https://www.instagram.com/reel/DNKKO9cJlil/>

- e. Kisah inspiratif pelaksanaan pemilu daerah dan strategi keterlibatan kelompok marginal atau pemilih muda.
- f. Upaya membangun masyarakat yang kritis, rasional, dan anti diskriminasi dalam berpolitik.

Selanjutnya, proses rekaman dilakukan di studio internal KPU atau tempat yang memadai untuk memastikan kualitas audio yang jernih dan profesional. Penggunaan narasi yang menarik dan bahasa yang mudah dipahami menjadi faktor penting agar pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan secara efektif. Setelah proses rekaman, dilakukan tahap editing untuk menyempurnakan hasil akhir, termasuk menghilangkan kesalahan dan menambahkan elemen pendukung seperti musik latar yang tidak mengganggu pesan utama.²²

Dalam tahap penyebaran, podcast yang telah selesai diproduksi kemudian diunggah ke berbagai platform media sosial seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. KPU Kota Bengkulu juga melakukan promosi melalui media lain agar podcast ini mencapai audiens yang lebih luas. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas penyebaran dan pemahaman masyarakat, KPU Kota Bengkulu juga melakukan interaksi langsung melalui fitur komentar, agar masyarakat dapat bertanya langsung dan mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai isu-isu kepemiluan. Dengan begitu, proses pembuatan dan penyebaran podcast bukan hanya sebatas teknis produksi konten, tetapi juga mencakup strategi komunikasi yang mampu menjangkau dan memberdayakan masyarakat dalam memahami isu-isu penting di masa menjelang pemilu.²³

Melalui proses ini, KPU Kota Bengkulu berharap podcast yang diproduksi tidak hanya menjadi media edukatif, tetapi juga mampu memperkuat partisipasi masyarakat serta mempercepat penyebaran informasi yang berkualitas dan terpercaya. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada pengelolaan konten yang tepat, penggunaan platform yang sesuai, serta strategi promosi yang mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat.

B. KENDALA DAN MANFAAT PEMANFAATAN PODCAST OLEH KPU KOTA BENGKULU DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI KEPEMILUAN

1. KENDALA PEMANFAATAN PODCAST OLEH KPU KOTA BENGKULU DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI KEPEMILUAN

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Teknis

²² Wulandari, R. (2021). Teknik Produksi Podcast untuk Komunikasi Publik. *Media Perspektif*, 12(1), 45-58.

²³ Sari, N. (2022). Strategi Komunikasi Interaktif dalam Sosialisasi Pemilu Melalui Media Digital. *Jurnal Komunikasi Politik*, 9(4), 215-230.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu kendala dominan yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan podcast oleh KPU Kota Bengkulu dalam menyampaikan informasi pemilihan. Pada dasarnya, produksi podcast membutuhkan serangkaian kemampuan teknis yang cukup kompleks dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Proses tersebut meliputi penyusunan alur pembahasan atau script, pengaturan peralatan rekaman seperti mikrofon, kamera, dan pencahayaan, pengoperasian software editing audio maupun Editing Video yang merupakan salah satu bagian paling penting dalam pembuatan podcast, editing video merupakan proses pasca produksi dalam pembuatan video atau menyunting beberapa video dengan cara menyambungkan gambar, video, suara menjadi satu kesatuan, hal ini dilakukan untuk membuat rekaman video menjadi suatu tampilan yang lebih menarik untuk dikonsumsi secara audio visual,²⁴ hingga teknik publikasi konten agar dapat tersampaikan dengan optimal kepada masyarakat.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa SDM yang dimiliki KPU Kota Bengkulu tidak secara khusus dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan produksi media digital semacam podcast. Pegawai KPU sebagian besar memiliki tugas pokok terkait administrasi pemilihan, penyusunan regulasi teknis, serta pelaksanaan tahapan pemilu. Dengan banyaknya beban kerja tersebut, sangat sulit membentuk tim produksi konten yang fokus, konsisten, dan profesional dalam menghasilkan podcast berkualitas.

Keterbatasan kompetensi teknis ini juga disertai dengan minimnya pelatihan internal mengenai pengelolaan media digital. Tidak semua pegawai memiliki latar belakang dalam bidang desain komunikasi visual, broadcasting, maupun teknologi informasi (TI). Akibatnya, produksi podcast sering mengandalkan SDM yang belajar secara autodidak, sehingga hasil produksi tidak selalu memenuhi standar kualitas visual dan audio yang menarik bagi masyarakat.²⁵

Selain itu, sarana dan prasarana pendukung produksi juga masih terbatas. Peralatan seperti kamera profesional, pencahayaan studio, mikrofon condenser, dan perangkat editing modern tidak sepenuhnya tersedia atau tidak selalu dalam kondisi optimal. Minimnya peralatan membuat KPU harus menyesuaikan proses produksi dengan sumber daya seadanya, yang berpengaruh pada hasil akhir podcast. Konten yang dihasilkan menjadi kurang kompetitif ketika dibandingkan dengan konten instansi lain atau media profesional yang lebih sering diakses masyarakat.

²⁴ Kornelius Permana Putra and others, 'PENERAPAN DASAR EDITING VIDEO KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KPU DIY) PADA PLATFORM', 6.2 (2023), pp. 1–17.

²⁵ Fenti Sahri, Staff bagian Parhubmas dan SDM KPU Kota Bengkulu, Wawancara (Kota Bengkulu, 14 November 2025. Pukul 14.34 WIB)

Keterbatasan ini secara keseluruhan berdampak pada kualitas penyampaian informasi pemilihan melalui podcast yang kurang maksimal. Meski informasi yang disampaikan tetap penting dan relevan, cara penyajiannya yang kurang menarik dan kurang profesional dapat memengaruhi tingkat perhatian dan minat masyarakat untuk mengikuti podcast secara berkala.

2. Kurangnya Kesadaran dan Minat Masyarakat

Rendahnya tingkat kesadaran dan minat masyarakat terhadap podcast menjadi kendala signifikan yang turut menghambat penyebaran informasi pemilihan melalui media tersebut. Secara umum, masyarakat Kota Bengkulu memiliki pola konsumsi informasi yang berbeda dengan masyarakat di kota-kota besar yang sudah terbiasa mengikuti podcast sebagai bagian dari gaya hidup digital. Di Bengkulu, penggunaan media sosial yang bersifat cepat, ringkas, dan mudah dibagikan seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp jauh lebih dominan dibandingkan platform YouTube yang digunakan untuk mengakses podcast, YouTube sendiri merupakan salah satu situs website yang menggunakan internet untuk menjalankan fiturnya, dimana dengan YouTube, seorang pengguna dapat memposting atau menampilkan video maupun animasi agar dapat dilihat dan dinikmati orang banyak.²⁶ Podcast yang diproduksi oleh KPU Kota Bengkulu akan dipublikasikan atau diposting pada platform youtube

Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan preferensi yang cukup jelas antara konten cepat (short content) dengan konten panjang (long content) seperti podcast. Masyarakat lebih tertarik pada konten visual singkat seperti reels, video pendek, atau poster digital, dibandingkan harus menonton podcast berdurasi 20-40 menit atau lebih. Kecenderungan ini membuat podcast KPU Kota Bengkulu memiliki hambatan besar dalam menarik perhatian audiens yang cenderung pragmatis dan menginginkan informasi dalam bentuk ringkas.

Selain itu, upaya promosi podcast oleh KPU dinilai masih terbatas. Belum ada strategi promosi yang intensif seperti kolaborasi dengan influencer lokal, publikasi rutin di media sosial, maupun kampanye digital yang secara masif memperkenalkan podcast sebagai sumber informasi resmi dari KPU. Akibatnya, banyak masyarakat yang bahkan tidak mengetahui bahwa KPU memiliki podcast yang memuat informasi penting mengenai pemilihan.

Rendahnya minat ini juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat bahwa pembahasan seputar pemilihan dianggap berat, formal, dan kurang menarik. Format podcast yang banyak memuat diskusi dan penjelasan dianggap tidak cocok dengan preferensi konsumsi informasi masyarakat yang lebih suka opsi cepat dan langsung. Jika konten tidak dikemas secara kreatif, informatif,

²⁶ Gede Lingga and others, 'Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media Youtube', 2 (2019), pp. 259–65.

dan dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, maka podcast akan sulit mencapai tingkat engagement yang tinggi.

Pada akhirnya, kurangnya kesadaran publik terhadap keberadaan podcast KPU serta rendahnya minat masyarakat untuk mengakses konten berdurasi panjang membuat media ini belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai sarana sosialisasi kepemiluan.

3. Podcast Kurang Menyentuh Laporan Masyarakat dan Tidak Semua Masyarakat Dapat Mengakses Internet

Selain tantangan teknis dan rendahnya minat masyarakat, podcast juga memiliki keterbatasan inheren sebagai media komunikasi satu arah. Podcast, terutama dalam bentuk video di YouTube, hanya memungkinkan penyampaian informasi dari narasumber kepada audiens tanpa memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan respons secara langsung. Padahal, dalam konteks penyelenggaraan pemilu, masyarakat membutuhkan saluran komunikasi dua arah untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan laporan, menyampaikan keluhan, atau meminta klarifikasi terkait berbagai tahapan pemilu.

Dengan sifat podcast yang non-interaktif, masyarakat tidak dapat memanfaatkan media ini untuk menyelesaikan persoalan secara cepat. Hal ini berbeda dengan layanan pengaduan seperti call center, help desk, atau kanal resmi melalui website KPU yang dirancang untuk merespons keluhan secara langsung. Kekurangan ini membuat podcast belum dapat berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat, melainkan masih sebatas alat sosialisasi yang informatif.

Selain itu, keterbatasan akses internet menjadi faktor penghambat lain yang cukup signifikan. Meskipun Bengkulu merupakan wilayah perkotaan, tidak semua masyarakat memiliki konektivitas internet yang memadai, baik karena keterbatasan infrastruktur maupun kemampuan ekonomi. Mengakses podcast dalam bentuk video di YouTube membutuhkan kuota internet yang relatif besar, sehingga masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas memilih untuk tidak menghabiskan kuotanya untuk menonton konten berdurasi panjang.²⁷

Masalah ini menciptakan kesenjangan digital yang berimplikasi pada kesenjangan informasi. Masyarakat perkotaan dengan akses internet stabil dapat menerima informasi kepemiluan melalui podcast, sementara masyarakat yang tinggal di pinggiran kota, kelompok berpenghasilan rendah, serta masyarakat lanjut usia menjadi tertinggal dalam hal informasi. Dengan demikian, penyampaian informasi melalui podcast tidak sepenuhnya inklusif dan berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pemahaman mengenai proses pemilu.

²⁷ Fenti Sahri, Staff bagian Parhubmas dan SDM KPU Kota Bengkulu, Wawancara (Kota Bengkulu, 16 November 2025. Pukul 10.21 WIB)

Secara keseluruhan, keterbatasan akses internet dan sifat podcast yang tidak interaktif membuat media ini belum ideal sebagai sarana komunikasi utama antara KPU dan masyarakat dalam konteks partisipasi dan pelaporan.

2. MANFAAT PEMANFAATAN PODCAST OLEH KPU KOTA BENGKULU DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI KEPEMILUAN

Pemanfaatan podcast sebagai media komunikasi publik oleh KPU Kota Bengkulu memberikan sejumlah manfaat strategis dalam meningkatkan kualitas penyampaian informasi pemilihan kepada masyarakat. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang semakin masif, lembaga penyelenggara pemilu dituntut untuk beradaptasi dengan pola komunikasi masyarakat yang kini lebih banyak mengonsumsi informasi melalui media digital. Istilah podcast merupakan akronim dari Pod dan Broadcasting yang merujuk pada perangkat Apple iPod sebagai platform distribusi podcast pertama, sedangkan Broadcasting yang berarti siaran atau penyiaran.²⁸ Secara sederhana, podcast diartikan sebagai teknologi yang digunakan untuk mendistribusikan, menerima, dan mendengarkan konten secara on-demand (sesuai permintaan) yang diproduksi oleh profesional maupun radio amatir.²⁹

Pertama, podcast memberikan fleksibilitas dalam akses informasi. Podcast, memiliki keunggulan yang dapat diakses secara otomatis, mudah dan kontrol ada di tangan konsumen, dapat dibawa-bawa, dan selalu tersedia. Hal ini tentunya dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai media informasi oleh para pelajar, khususnya mahasiswa. Mahasiswa yang telah memahami teknologi, dapat dekat mudah mengakses podcast secara mandiri. Selain itu, mudahnya pemakaian podcast menyebabkan podcast dapat diputarkan kapan saja dan dimana saja bahkan dengan menggunakan perangkat pemutar sederhana, misalnya komputer atau telepon pintar.³⁰

Tidak seperti sosialisasi tatap muka yang terbatas oleh ruang dan waktu, podcast dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan pemilih untuk mengonsumsi informasi pemilihan sesuai waktu senggang mereka, misalnya saat berkendara, bekerja, atau melakukan aktivitas lainnya. Fleksibilitas ini sejalan dengan karakteristik media digital yang bersifat on-demand, di mana audiens memiliki kontrol penuh terhadap kapan dan bagaimana mereka ingin mengakses konten. Dengan demikian, podcast KPU memungkinkan informasi terkait tahapan pemilu, tata cara pemungutan suara, persyaratan calon, maupun edukasi demokrasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.

²⁸ Fadillah, Efi. (2017). Podcast sebagai Alternatif Distribusi Konten Audio. *Kajian Jurnalisme*, I (1), hlm. 96.

²⁹ Bonini, T. (2015). The 'Second Age' of Podcasting: Reframing Podcasting as A New Digital Mass Medium. *Quaderns del CAC* 41, XVIII (I), hlm. 25.

³⁰ Annisa Eka Syafrina and others, 'PENGUNAAN PODCAST SEBAGAI MEDIA INFORMASI DI', pp. 10–22.

Kedua, pemanfaatan podcast berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Melalui format perbincangan atau dialog, KPU Kota Bengkulu dapat menyampaikan penjelasan secara langsung terkait isu-isu kepemiluan yang sering menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu. Podcast memungkinkan KPU memberikan klarifikasi terhadap isu-isu aktual, menjelaskan kebijakan, serta menghadirkan narasumber kompeten untuk memberikan perspektif yang otoritatif. Dengan menggunakan bahasa yang lebih santai namun informatif, podcast dapat menjadi jembatan antara KPU dan masyarakat untuk mengurangi kesalahpahaman sekaligus meningkatkan pemahaman publik.

Ketiga, podcast berperan penting dalam meningkatkan literasi dan pendidikan politik masyarakat. Dalam sistem demokrasi, pengetahuan politik yang baik menjadi prasyarat bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Melalui podcast, KPU dapat menyampaikan materi-materi edukatif seperti pentingnya partisipasi politik, prosedur pemutakhiran data pemilih, fungsi lembaga penyelenggara pemilu, hingga etika kampanye. Metode penyampaian yang naratif dan dialogis memungkinkan materi-materi yang dianggap kompleks oleh masyarakat dapat dijelaskan secara lebih sederhana dan menarik. Hal ini sejalan dengan upaya nasional dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Keempat, podcast menjadi media yang efektif dalam menjangkau kelompok pemilih muda, yang merupakan segmen pemilih terbesar dalam beberapa pemilu terakhir. Pemilih muda mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu yang nantinya berpengaruh kepada kemajuan bangsa oleh karena itu sosialisasi mengenai kepemiluan menjadi agenda penting dalam meningkatkan kesadaran pemilih muda.³¹ Generasi muda cenderung mengonsumsi informasi melalui platform digital seperti YouTube, Spotify, atau layanan streaming lainnya. Dengan hadirnya podcast, KPU Kota Bengkulu dapat menjalin kedekatan dengan pemilih muda melalui medium yang sesuai dengan preferensi mereka. Format audio yang ringan dan mudah dipahami juga membuat konten lebih mudah diterima oleh audiens muda dibandingkan sosialisasi formal yang cenderung kaku. Hal ini menjadi penting karena pemilih muda sering kali memiliki partisipasi politik yang fluktuatif, sehingga pendekatan yang kreatif dan inovatif dibutuhkan untuk meningkatkan keterlibatan mereka.

Kelima, podcast juga memberikan manfaat sebagai arsip digital informasi kepemiluan yang dapat diakses kembali. Setiap episode podcast yang diproduksi KPU Kota Bengkulu

³¹ Dalinama Telaumbanua and others, 'Peran Pemilih Muda Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilu', 2019.

tersimpan secara permanen dalam platform distribusi digital. Arsip ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi peneliti, mahasiswa, atau pegiat demokrasi yang membutuhkan data dan informasi resmi terkait penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, podcast yang dipublikasikan menjadi bagian dari dokumentasi jangka panjang yang dapat memberikan nilai historis sekaligus akademis.

Selain itu, keberadaan podcast turut memberikan manfaat internal bagi KPU itu sendiri. Produksi konten digital mendorong peningkatan inovasi dan kreativitas di lingkungan KPU serta mengembangkan kapasitas komunikasi publik internal. Dengan adanya tuntutan untuk menyajikan informasi secara komunikatif, efektif, dan menarik, staf KPU terdorong untuk meningkatkan kemampuan dalam literasi media, penyusunan naskah, teknik wawancara, hingga pengelolaan platform digital. Dengan demikian, podcast tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat sebagai penerima informasi, tetapi juga bagi KPU dalam membangun budaya kerja yang lebih adaptif dan profesional pada era digital.

Secara keseluruhan, pemanfaatan podcast oleh KPU Kota Bengkulu memiliki nilai strategis dalam memperkuat komunikasi publik, meningkatkan literasi kepemiluan, serta memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Kehadiran podcast sebagai sarana sosialisasi modern menjadi salah satu inovasi penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami, sekaligus memperkuat peran KPU sebagai penyelenggara pemilu yang responsif dan transparan. Dengan terus mengembangkan kualitas produksi dan strategi distribusi konten, podcast berpotensi menjadi salah satu kanal komunikasi utama yang mendukung peningkatan partisipasi politik masyarakat di masa depan.

KESIMPULAN

Pemanfaatan podcast oleh KPU Kota Bengkulu merupakan salah satu inovasi strategis dalam menyampaikan informasi kepemiluan di era digital, khususnya dalam menghadapi perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke arah media daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa podcast mampu menjadi sarana sosialisasi yang informatif, fleksibel, dan relevan bagi berbagai kelompok masyarakat, terutama pemilih muda yang lebih dekat dengan teknologi. Melalui podcast, KPU dapat menyampaikan penjelasan mengenai tahapan pemilu, edukasi pemilih, serta isu-isu strategis lainnya secara lebih santai, komunikatif, dan mudah dipahami. Namun, pemanfaatan podcast ini belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan

peralatan teknis, minimnya pelatihan produksi konten digital, rendahnya kesadaran dan minat masyarakat terhadap konten berdurasi panjang, serta hambatan akses internet yang tidak merata. Meski demikian, keberadaan podcast tetap memberikan manfaat signifikan, baik sebagai media edukasi politik, peningkatan transparansi, maupun sebagai arsip digital yang dapat diakses kapan saja. Oleh karena itu, ke depan KPU Kota Bengkulu perlu meningkatkan kualitas produksi, memperluas strategi distribusi konten, serta memperkuat promosi agar podcast dapat berfungsi lebih efektif sebagai media komunikasi publik yang mendukung peningkatan literasi dan partisipasi pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, Bayu Dwi. "Kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 567-582.
- Amsari, Feri. *Perubahan UUD 1945 dan Implikasinya terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- Annisa Eka Syafrina, dkk. "Penggunaan Podcast sebagai Media Informasi." *Jurnal ...*, hlm. 10-22.
- Bonini, Tiziano. "The 'Second Age' of Podcasting: Reframing Podcasting as A New Digital Mass Medium." *Quaderns del CAC* 41, XVIII(1) (2015): 25.
- Chairunnisa, Fanaqi. "Strategi Komunikasi KPU Kabupaten Garut dalam Sosialisasi Pemilu 2014 kepada Kelompok Disabilitas di Kabupaten Garut." *Jurnal Komunikasi Universitas Garut* 4, no. 1 (2018): 26-30.
- Databoks. "Indonesia, Negara dengan Pendengar Podcast Terbanyak Awal 2025." Diakses 17 November 2025.
- Efi Fadilah, Pandan Yudhaprarnesti, dan Nindi Aristi. "Podcast sebagai Alternatif Distribusi Konten Audio." *Jurnal Kajian Jurnalisme* 1, no. 1 (2017): 92-96.
- Fadillah, Efi. "Podcast sebagai Alternatif Distribusi Konten Audio." *Kajian Jurnalisme* 1, no. 1 (2017): 96.
- Farida Indrati, Maria. "Budaya Konstitusional dan Peran Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 722-735.
- . "Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara melalui Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 540.
- Gede Lingga, dkk. "Pemanfaatan Animasi Promosi dalam Media YouTube." *Jurnal ...* 2 (2019): 259-265.

GoodStats. "Fenomena Podcast, Dianggap Konten Segar dan Mulai Dinikmati Gen Z Indonesia." Diakses 17 November 2025.

Gun Gun Heryanto dan Shanty Rumar. *Komunikasi Politik: Sebuah Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2017.

Harun, Refly. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2018.

IDN Research Institute. *Indonesia Millennial & Gen Z Report 2025*. Jakarta: IDN Media, 2025.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. LN No. 182 Tahun 2017.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. BN No. 193 Tahun 2018.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Panduan Penggunaan Media Sosial untuk Instansi Pemerintah*. Jakarta: Kominfo, 2022.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu. *Pedoman Penyusunan Konten Media Sosial dalam Program Edukasi Pemilu*. Bengkulu: KPU Kota Bengkulu, 2023.

KPU Kota Bengkulu. "#TemaNpemilih, Podcast bersama Risen Lubis, S.Pd-Anggota KPU Kota Bengkulu." Instagram Reel, 2025.

KPU Kota Bengkulu. "Podcast bersama Ibu Rosdiana, Kabid Politik Kesbangpol Kota Bengkulu." Instagram Reel, 2025.

KPU Kota Bengkulu. "Era Digital, Tantangan Baru untuk Demokrasi!, narasumber Hendri Akbar." Instagram Reel, 2025.

KPU Kota Bengkulu. "Podcast bersama Fonika Thoyib (Ketua KPID), Dosen, dan Praktisi." Instagram Reel, 2025.

Kornelius Permana Putra, dkk. "Penerapan Dasar Editing Video Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) pada Platform" 6, no. 2 (2023): 1-17.

Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.

Panuju, Redi. "Podcast Politik Indonesia: Upaya Mencari Calon Presiden Indonesia 2024." *Jurnal Komunikasi Nusantara* 5, no. 1 (2023): 56.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Sari, N. "Strategi Komunikasi Interaktif dalam Sosialisasi Pemilu Melalui Media Digital." *Jurnal Komunikasi Politik* 9, no. 4 (2022): 215-230.

Supriyono, A. "Strategi Komunikasi Digital KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih." *Jurnal Komunikasi dan Media* 8, no. 2 (2022): 145-160.

Telaumbanua, Dalinama, dkk. "Peran Pemilih Muda dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilu." 2019.

We Are Social. *Indonesia Digital Report 2025*. Singapore: We Are Social, 2025.

Wulandari, R. "Teknik Produksi Podcast untuk Komunikasi Publik." *Media Perspektif* 12, no. 1 (2021): 45-58.

Wawancara: Fenti Sahri, Staff Parhubmas dan SDM KPU Kota Bengkulu. Kota Bengkulu, 14 November 2025, pukul 14.34 WIB.

Wawancara: Fenti Sahri, Staff Parhubmas dan SDM KPU Kota Bengkulu. Kota Bengkulu, 16 November 2025, pukul 10.21 WIB.

Berry, Richard. "Podcasting: Considering The Evolution of The Medium and Its Association with The Word 'Radio'." *The Radio Journal: International Studies in Broadcast and Audio Media* 14, no. 1 (2016): 15-18.